

TARGET CAPAIAN B03 AKSI PK TAHUN 2019-2020
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Aksi/Sub Aksi	Komponen Penanggungjawab	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian B03	Target Capaian B06	Data dukung/Evidence	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
A.1.	Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal	Ditjen Bina Adwil					
S.A.1	Meningkatnya kemudahan berusaha di daerah bagi pengusaha kecil dan menengah	Ditjen Bina Adwil	1 Dihapuskannya prasyarat pengajuan izin usaha di seluruh daerah yang sudah tidak diwajibkan oleh peraturan lebih tinggi	Pertanyaan SKDU/HO dimuat dalam e-monev Kemendagri	Daerah yang masih mensyaratkan SKDU/HO teridentifikasi.	Screenshot e-Monev	pertanyaan konfirmasi terhadap persyaratan SKDU/HO telah dimuat dalam daftar pertanyaan pada kuesioner e-monev
			2 Dihapuskannya prasyarat pengajuan izin usaha di seluruh daerah yang sudah tidak diwajibkan oleh peraturan lebih tinggi	Rumusan disinsentif fiskal bagi daerah yang masih mensyaratkan SKDU/HO.	Regulasi MDN+Kemenkeu Penegasan Pelarangan Persyaratan SKDU dan HO dengan disinsentif fiskal	Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan kepada Inspektur Jenderal Perihal Penyampaian Data Daerah yang Mensyaratkan SKDU/HO/SITU	Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi melalui e-Monev Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Administrasi telah menyampaikan perkembangan pemetaan daerah yang masih mensyaratkan SKDU/HO dalam pengajuan izin usaha. Selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan bersama dengan unit kerja terkait di lingkungan Kemendagri terkait disinsentif fiskal bagi daerah yang masih mensyaratkan SKDU/HO
					30% daerah yang menghapus persyaratan SKDU/HO		
			3 Terintegrasinya aplikasi perizinan di K/L dengan Online Single Submission (OSS)		Monev Integrasi OSS-Daerah menggunakan SICANTIK/SIMANTRA atau aplikasi lain: 50 daerah		
					Teridentifikasinya seluruh jenis izin, rekomendasi, sertifikat dan sejenisnya di Kemendagri		
			4 Terbangunnya mekanisme pengendalian kepatuhan pemohon izin yang mendapatkan pelayanan Online Single Submission (OSS)		Monev Integrasi OSS-Daerah menggunakan SICANTIK/SIMANTRA atau aplikasi lain: 50 daerah		
					Teridentifikasinya seluruh jenis izin, rekomendasi, sertifikat dan sejenisnya di Kemendagri		
A.2	Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan	Ditjen Bina Adwil					
S.A.3	1. Optimalisasi Tata Kelola Pengawasan Hutan 2. Dibukanya data penetapan hutan yang sudah ditetapkan ke publik		1 Implementasi One-Map Policy	Kompilasi I IGT batas administrasi kabupaten/kota dan provinsi di Kaltim, Sulbar, Riau, Papua	Kompilasi II IGT batas administrasi kabupaten/kota dan provinsi di Kaltim, Sulbar, Riau, Papua	Berita Acara Integrasi	telah dilakukan kompilasi IGT batas administrasi kab/kota di wilayah provinsi Kaltim, Sulbar, Riau dan Papua sesuai target serta 5 Provinsi lainnya, yaitu Sumsel, Jambi, Sumbang, Lampung dan Babel sebagaimana data berita acara integrasi terlampir
				Perbaikan IGT batas administrasi kabupaten/kota dan provinsi di Kalteng		Berita Acara Integrasi	telah dilakukan kompilasi IGT batas administrasi kab/kota di wilayah provinsi Kalteng sebagaimana data berita acara integrasi terlampir
A.3	Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi	Ditjen Dukcapil					
S.A.5	Meningkatnya ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan subsidi terhadap petani		Terbangunnya basis data yang handal kepada penerima bantuan sosial (by name by address, terkini/mutakhir, berbasis NIK)	Terbentuknya Task Force percepatan penyelesaian perekaman KTP-Elektronik di seluruh Indonesia yang memungkinkan dan mampu menjangkau kemudahan pelayanan adminduk di tingkat desa/daerah terpendcil		Draft SK Tim	Tim Task Force percepatan penyelesaian perekaman KTP-Elektronik yang terdiri dari perwakilan K/L terkait saat ini sedang dalam proses pengajuan untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sebagai data dukung, terlampir disampaikan draft Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud.
A.5	Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta	Ditjen Bina Keuda					

No	Aksi/Sub Aksi	Komponen Penanggungjawab	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian B03	Target Capaian B06	Data dukung/Evidence	Catatan
S.A.7	1. Peningkatan manajemen anti suap bagi perusahaan swasta. 2. Peningkatan profesi anti suap di sektor swasta		Penerapan sistem manajemen anti suap (standar yang mirip dengan ISO 37001 maupun panduan anti suap sektor swasta) secara meluas melalui Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kamar Dagang Indonesia, Asosiasi Usaha dan Pemerintah Daerah.	Tersosialisasikannya sistem manajemen anti suap berdasarkan Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha atau ISO 37001 sebagai referensi, oleh Kementerian Dalam Negeri kepada BUMD di Provinsi target		Undangan Rapat	Sesuai hasil pembahasan pada rapat koordinasi dan konsolidasi pelaporan B03 pelaksanaan renaksi Stranas PK dan OGI lingkup penugasan Kemendagri disampaikan penjelasan oleh Ditjen Keuda bahwa berdasarkan rencana kegiatan sosialisasi sistem manajemen anti suap berdasarkan Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha atau ISO 37001 sebagai referensi, oleh Kementerian Dalam Negeri kepada BUMD di Provinsi target akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2019 pada rapat kerja Keuangan Daerah.
A.6	Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik	Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Keuda					
S.A.8	Terwujudnya interoperabilitas sistem perencanaan, penganggaran, penatalaksanaan (termasuk pengadaan) dan pelaporan berbasis elektronik		Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah (bagian dari Peraturan Presiden Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Disepakatinya Road Map untuk integrasi seluruh tahapan dalam siklus anggaran yang meliputi perencanaan-penganggaran, pelaksanaan, pelaporan atau pertanggungjawaban serta evaluasi atau audit (integrasi horisontal) di tingkat daerah		Dokumen Kesepakatan Integrasi e-Planning dan e-Budgeting	Penyepakatan untuk Road Map untuk integrasi seluruh tahapan dalam siklus anggaran yang meliputi perencanaan-penganggaran, pelaksanaan, pelaporan atau pertanggungjawaban serta evaluasi atau audit (integrasi horisontal) di tingkat daerah sedang dalam proses pembahasan, dan telah dilakukan beberapa rapat/pertemuan, antara lain: 1. rapat integrasi e-planning dan e-budgeting, tanggal 1 april 2019 bertempat di data center Ditjen Bina Bangda (Nota kesepakatan rapat terlampir) 2. lokakarya penyusunan roadmap integrasi sistem perencanaan dan penganggaran, tanggal 5 April 2019 di hotel A one.
A.7	Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Ditjen Otda					
S.A.9	Tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa minimal pada level 3 di 100 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah		Terbitnya regulasi tentang pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Disosialisasikannya Permendagri tentang Pembentukan UKPBJ di Pemerintah Daerah		Radiogram Undangan dan Daftar Undangan	Telah dilakukan sosialisasi Permendagri tentang Pembentukan UKPBJ di Pemerintah Daerah pada tanggal 23 November 2018 di Jakarta dengan peserta pemerintah daerah provinsi dan kab/kota sebagaimana data dukung terlampir

No	Aksi/Sub Aksi	Komponen Penanggungjawab	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian B03	Target Capaian B06	Data dukung/Evidence	Catatan
A.8	Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak						
S.A.15	Perluasan dan optimalisasi pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	Biro Keuangan	Tersedianya basis data penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	1 Telah disampaikannya data ke DJP atas permohonan izin yang telah dilakukan KSWP secara periodik (izin tahun 2018)		Permendagri 112 Tahun 2018	Kebijakan terkait dengan KSWP sesuai kewenangan Kementerian Dalam Negeri adalah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan KSWP dalam proses penerbitan izin sesuai dengan Permendagri No.112 Tahun 2016 tentang konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan pemerintah daerah. Di dalam Permendagri tersebut tidak mengatur ijin tertentu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
		Ditjen Bina Keuda		2 Disampaikannya Laporan Implementasi Pelaksanaan KSWP bagi layanan publik tertentu terkait evaluasi efektivitas pelaksanaan KSWP (hambatan, solusi dan Sinkronisasi aturan penerapan KSWP atas layanan-layanan yang telah dilimpahkan ke pihak lain seperti Pemda, BKPM, lembaga OSS,dll) untuk pelaksanaan tahun 2018		Permendagri 112 Tahun 2018	1. Tidak terdapat layanan-layanan yang dilimpahkan dari Kemendagri ke pihak lain seperti Pemda, BKPM, lembaga OSS,dan lain-lainnya; 2. Kebijakan terkait dengan KSWP sesuai kewenangan Kemendagri adalah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan KSWP dalam proses penerbitan izin sesuai dengan Permendagri No.112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah. Di dalam Permendagri tersebut tidak mengatur ijin tertentu di lingkungan Kemendagri.
A.9	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
S.A.19	Terciptanya pengawasan internal pemerintah yang independen, objektif dan berintegritas	Itjen	1 Unifikasi standar kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan perluasan proses sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Tersedianya pokok pikiran unifikasi standar kompetensi umum bagi jafung di lingkungan APIP		Dokumen: Kerangka Konseptual Unifikasi Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat	Telah disusun dan dibahas pokok pikiran tentang unifikasi standar kompetensi umum bagi Jabatan Fungsional APIP.
			2 Kecukupan anggaran operasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berdasarkan rasio dengan anggaran kementerian dan lembaga	Tersedianya pokok-pokok pikiran Permendagri mengenai standar penganggaran pengawasan inspektorat daerah		Surat Inspektur Jenderal kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait Penyampaian Standar Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Telah disusun pokok pikiran terkait Standar Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk diakomodir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD
			3 Kecukupan anggaran operasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berdasarkan rasio dengan anggaran kementerian dan lembaga	Revisi permendagri no. 16/2007 tentang Evaluasi APBD Dalam hal pemda tidak menganggarkan anggaran APIP sesuai dengan Pedum APBD (maka no. Registernya tidak dikeluarkan)		PP 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Telah diatur ketentuan evaluasi APBD yang secara teknis akan melibatkan APIP sehingga penganggaran bidang pengawasan akan lebih optimal
			4 Penguatan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah melalui perubahan pola pertanggungjawaban/laporan	Tersedianya pokok-pokok pikiran Permendagri mengenai pola pertanggungjawaban/laporan sebagai tindak lanjut revisi PP 18/2016		Draft Revisi PP 18/2016	Pokok-pokok pikiran terkait pola pertanggungjawaban/laporan hasil pengawasan APIP dan telah diakomodir dalam rancangan revisi PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana draft revisi PP terlampir
S.A.20	Terbangunnya kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Itjen	1 Kecukupan jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di K/L dan Pemerintah Daerah dengan penetapan rasio yang menggambarkan beban kerja/cakupan wilayah atau resiko yang teridentifikasi	Tersedianya hasil pemetaan SDM APIP (kuantitas dan kompetensi)		Hasil Inventarisasi APIP Daerah (P2UPD)	Pemetaan APIP secara nasional (kuantitas dan kompetensi) sedang dalam proses pendataan bersamaan dengan sedang dilaksanakannya proses Inpassing JFP2UPD secara Nasional sampai Tahun 2021
		Ditjen Otda, Biro Ortala	2 Terlaksananya penataan kelembagaan yang ideal (right sizing) 2019-2024	Minimal 3 Pemerintah Provinsi yang melakukan evaluasi perangkat daerah berdasarkan PerMendagri 99/2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah		Usulan Revisi Perda tentang Perangkat Daerah oleh 4 Daerah Provinsi	Telah dilakukan evaluasi perangkat daerah berdasarkan Permendagri 99/2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah. Telah ditindaklanjuti dengan usulan perubahan Perda tentang perangkat daerah oleh 4 Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Barat
A.10	Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa						

No	Aksi/Sub Aksi	Komponen Penanggungjawab	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian B03	Target Capaian B06	Data dukung/Evidence	Catatan
S.A.22	Meningkatnya integritas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa	Ditjen Bina Pemdes, Itjen	Tersusunnya regulasi tentang strategi nasional pengawasan keuangan desa	Terbentuknya Tim Perumus/Pokja yang terdiri dari (Kemendagri, KemenDesa, KemenKeu dan BPKP) tentang pengawasan keuangan desa		Draft Peraturan Presiden tentang Grand Design Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Sampai saat ini pembentukan tim perumus/pokja tentang pengawasan keuangan desa. secara simultan, beberapa pertemuan telah diinisiasi bersama dengan Tim Teknis Stranas PK di KPK. Namun demikian, Kemendagri telah menyusun rancangan Perpres tentang Grand Design Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana terlampir
				Tersusunnya draf regulasi Strategi Pengawasan keuangan desa/Kelurahan, termasuk disepakatinya sistem pengawasan keuangan desa (tunggal) yang akan digunakan Penetapan kanal pengaduan keuangan Desa. Termasuk di dalamnya: - Penanggungjawab Kompilasi pengaduan tingkat Kec, Kab, Prov, Pusat - Protokol Notifikasi penerimaan dan penanganan pengaduan Pedoman pengawasan dan program kerja oleh APIP berbasis risiko (pemanfaatan data pada sistem keuangan desa oleh APIP). Kemendagri melaksanakan program pengembangan kapasitas APIP		Draft Peraturan Presiden tentang Grand Design Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Telah dikoordinasikan tim lintas sektor dan diusulkan pengaturan terkait strategi pengawasan keuangan desa diatur dengan Peraturan Presiden. Draft peraturan presiden sebagaimana terlampir

No	Aksi/Sub Aksi	Komponen Penanggungjawab	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian B03	Target Capaian B06	Data dukung/Evidence	Catatan
			Terintegrasinya seluruh kanal pengaduan masyarakat terkait keuangan desa dan tertangani secara terpadu	Terbentuknya Tim Perumus/Pokja yang terdiri dari (Kemendagri, KemenDesa, KemenKeu dan BPKP) tentang pengawasan keuangan desa		Draft Peraturan Presiden tentang Grand Design Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	secara formal Tim Perumus/Pokja belum terbentuk namun telah dilakukan beberapa kali rapat teknis lintas K/L terkait mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pengawasan keuangan desa
				Tersusunnya draf regulasi Strategi Pengawasan keuangan desa/Kelurahan, termasuk disepakatinya sistem pengawasan keuangan desa (tunggal) yang akan digunakan Penetapan kanal pengaduan keuangan Desa. Termasuk di dalamnya: - Penanggungjawab Kompilasi pengaduan tingkat Kec, Kab, Prov, Pusat - Protokol Notifikasi penerimaan dan penanganan pengaduan Pedoman pengawasan dan program kerja oleh APIP berbasis risiko (pemanfaatan data pada sistem keuangan desa oleh APIP). Kemendagri melaksanakan program pengembangan kapasitas APIP		Draft Peraturan Presiden tentang Grand Design Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Telah disusun rancangan peraturan presiden tentang grand design pembinaan dan pengelolaan keuangan desa yang seara substansi telah mengatur ketentuan pengawasan keuangan desa dengan pembagian peran penanggungjawab penanganan pengaduan

**TARGET CAPAIAN B03 AKSI PK TAHUN 2019-2020
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

No	Aksi/Sub Aksi	Komponen Penanggungjawab	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian B03	Target Capaian B06	Data dukung/Evidence	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
A.1.	Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal	Ditjen Bina Adwil					
S.A.1	Meningkatnya kemudahan berusaha di daerah bagi pengusaha kecil dan menengah	Ditjen Bina Adwil	<p>1 Dihapuskannya prasyarat pengajuan izin usaha di seluruh daerah yang sudah tidak diwajibkan oleh peraturan lebih tinggi</p> <p>2 Dihapuskannya prasyarat pengajuan izin usaha di seluruh daerah yang sudah tidak diwajibkan oleh peraturan lebih tinggi</p> <p>3 Terintegrasinya aplikasi perizinan di K/L dengan Online Single Submission (OSS)</p> <p>4 Terbangunnya mekanisme pengendalian kepatuhan pemohon izin yang mendapatkan pelayanan Online Single Submission (OSS)</p>	<p>Pertanyaan SKDU/HO dimuat dalam e-monev Kemendagri</p> <p>Rumusan disinsentif fiskal bagi daerah yang masih mensyaratkan SKDU/HO.</p>	<p>Daerah yang masih mensyaratkan SKDU/HO teridentifikasi.</p> <p>Regulasi MDN+Kemenkeu Penegasan Pelarangan Persyaratan SKDU dan HO dengan disinsentif fiskal</p> <p>30% daerah yang menghapus persyaratan SKDU/HO</p> <p>Monev Integrasi OSS-Daerah menggunakan SICANTIK/SIMANTRA atau aplikasi lain: 50 daerah</p> <p>Teridentifikasinya seluruh jenis izin, rekomendasi, sertifikat dan sejenisnya di Kemendagri</p> <p>Monev Integrasi OSS-Daerah menggunakan SICANTIK/SIMANTRA atau aplikasi lain: 50 daerah</p> <p>Teridentifikasinya seluruh jenis izin, rekomendasi, sertifikat dan sejenisnya di Kemendagri</p>	<p>Screenshot e-Monev</p> <p>Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan kepada Inspektur Jenderal Perihal Penyampaian Data Daerah yang Mensyaratkan SKDU/HO/SITU</p>	<p>pertanyaan konfirmasi terhadap persyaratan SKDU/HO telah dimuat dalam daftar pertanyaan pada kuesioner e-monev</p> <p>Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi melalui e-Monev Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Administrasi telah menyampaikan perkembangan pemetaan daerah yang masih mensyaratkan SKDU/HO dalam pengajuan izin usaha. Selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan bersama dengan unit kerja terkait di lingkungan Kemendagri terkait disinsentif fiskal bagi daerah yang masih mensyaratkan SKDU/HO</p>
A.2	Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan	Ditjen Bina Adwil					
S.A.3	1. Optimalisasi Tata Kelola Pengawasan Hutan 2. Dibukanya data penetapan hutan yang sudah ditetapkan ke publik		<p>1 Implementasi One-Map Policy</p>	<p>Kompilasi I IGT batas administrasi kabupaten/kota dan provinsi di Kaltim, Sulbar, Riau, Papua</p> <p>Perbaikan IGT batas administrasi kabupaten/kota dan provinsi di Kalteng</p>	<p>Kompilasi II IGT batas administrasi kabupaten/kota dan provinsi di Kaltim, Sulbar, Riau, Papua</p>	<p>Berita Acara Integrasi</p> <p>Berita Acara Integrasi</p>	<p>telah dilakukan kompilasi IGT batas administrasi kab/kota di wilayah provinsi Kaltim, Sulbar, Riau dan Papua sesuai target serta 5 Provinsi lainnya, yaitu Sumsel, Jambi, Sumbar, Lampung dan Babel sebagaimana data berita acara integrasi terlampir</p> <p>telah dilakukan kompilasi IGT batas administrasi kab/kota di wilayah provinsi Kalteng sebagaimana data berita acara integrasi terlampir</p>